
Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik

Agatha Sofia¹, Donita Simanungkalit², Eka Mei Riska Sitepu³, Frans Togu Sihombing⁴, Rahma Dhani Fitria Sinaga⁵, Roselli Lumbansiantar⁶, Prayetno⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹agathasofiamargaretha@gmail.com, ²donitasimanungkalit13@gmail.com, ³meiriska.26eka@gmail.com, ⁴franstogusihombing@gmail.com, ⁵sinagafitria3@gmail.com, ⁶sellylumbansiantar@gmail.com, ⁷eno.pray@gmail.com

Abstrak

Artikel atau artikel ini bertujuan untuk memahami realitas perilaku pemilih dari sudut pandang mahasiswa terkait politik uang. Permasalahan difokuskan pada indikator apa yang melatarbelakangi terjadinya politik uang yang saat ini menjadi tantangan terbesar dalam sistem demokrasi. Data dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh kandidat atau kontestan politik tertentu dan dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam menyediakan dan menyebarkan politik uang tersebut. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah baru lainnya di masyarakat dan pemerintahan, sehingga membawa dampak negatif jangka panjang.

Kata Kunci: Demokrasi, Perilaku Pemilih, Politik Uang

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Dalam era demokratisasi sekarang ini, hubungan antara kandidat dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil. Karena semakin kritisnya masyarakat dan semakin lunturnya Ikatan tradisional maupun primordional. Padahal, kandidat tak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih. Sehingga tidak mengherankan apabila menjelang pemilu, kandidat ramai-ramai mendekati pemilih untuk memberikan pilihannya. Sementara itu, di sisi lain, para pemilih juga seringkali memindah-mindahkan dukungan mereka dari satu partai ke partai lain. Dengan semakin meningkatnya massa mengambang dan non-partaisan, harus disadari bahwa ikatan ideologi yang dulu sangat kuat itu sekarang telah luntur. Pemilih semakin Hari menjadi sangat kritis dan selalu mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan partai pemenang pemilu. Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang boleh saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu Tetapi tertarik dengan kandidat/calon kepala daerah yang diajukan oleh partai tersebut. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, ada kelompok masyarakat yang non-partai, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak diikatkan kepada suatu partai politik yang boleh menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih. Ketidakhadiran insentif ekonomi ketika pemilih menentukan pilihan politik membuat banyak kalangan berpendapat bahwa, secara individual, memilih lebih merupakan keputusan konsumsi ketimbang keputusan investasi. Insentif ekonomi.

Pemilih dalam posisi indifferent secara ekonomis. Artinya memilih suatu kandidat tidak menjadi lebih mahal atau murah dibandingkan dengan memilih kandidat lain secara ekonomis pada saat 'membeli' (kendati harus diingat bahwa sesungguhnya pilihan salah yang dilakukan oleh banyak orang akan berakibat pada kebijakan politik dan selanjutnya pada perekonomian masyarakat secara umum, termasuk perekonomian individu). Hal ini juga yang mengarahkan pada pemahaman bahwa memilih selama pemilu lebih didorong oleh alasan-alasan non-ekonomis seperti ideologi dan Budaya. Masalah money politik yang muncul akibat berbagai factor seperti segi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Kini, pada masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Pemilu merupakan suatu pesta besar dalam demokrasi yang dimana setiap masyarakat bebas memberikan hak suara mereka terhadap

para partai yang mencalonkan, dalam menuju pemilu banyak nya para kandidat yang dipilih oleh partai tersebut untuk turun dalam lingkungan masyarakat dengan memberi buah tangan ini lah yang sering kita sebut sebagai “Money politik”, hal ini tidak dapat terhindarkan, karena hal ini masyarakat menjadi goyah terhadap pilihannya.

Pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini termasuk praktik politik uang. Money Politik dipertahankan menjadi sebuah praktik yang merusak demokrasi, bahkan pada tahap sekarang ini ini. Hal ini kerap terjadi saat musim pemilu, seolah menjadi syarat wajib bagi setiap calon Pejabat di tingkat pusat dan daerah Dukung dan tentunya suara mayoritas masyarakat jika ini terus berlanjut Jadi jangan abaikan realitas money politik ini. Mereka menjadi budaya atau tradisi dalam pilihan itu sendiri dan mengaburkan maknanya dan makna demokrasi yang sebenarnya.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif yang dimana memiliki pengertian yaitu memperoleh, pemahaman, mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleksitas sosial dan menggunakan Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, 2003).

Bahan yang digunakan dalam teknik ini didapat dari berbagai referensi buku, jurnal, artikel dan media massa yang selanjutnya dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya peneliti atau penulis bisa memperdalam pemahaman atas topik yang dipilih. Sekaligus membantu memperluas pengetahuan, sehingga di masa mendatang bisa menemukan topik yang menarik lagi untuk diangkat sebagai topik tulisan maupun penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut agar memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait kajian yang telah dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Konsep Demokrasi

Demokrasi ialah suatu sistem politik dalam negara yang telah menjadi mayoritas dalam denial berpolitik, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai kesadaran akan politik untuk mewujudkan kedalam perbuatan sehari-hari. Yang dimana di Indonesia, demokrasi ini sangatlah dibangga-banggakan, dan dianggap paling ideal, karena demokrasi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat. Dan juga memberikan peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, mengutarakan pendapat, mendirikan organisasi yang bernilai positif yang tidak merugikan masyarakatnya. Berbicara tentang demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokrasi, sebuah kegiatan politik sangat diperlukan, seperti yang kita ketahui perjalanan demokrasi politik di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan semenjak masa pasca kemerdekaan hingga sampai sekarang. Namun perubaha suatu sistem pemerintahan ini memiliki tujuan untuk dapat membangun demokrasi yang benar-benar ideal dan sangat baik untuk diterapkan di Indonesia. Maka dari itu sanagtlah diharapkan konsekoensi yang logis dari perubahan sistem politik diIndonesia, yang tentunya membawa dampak bagi jalannya pemerintahan. Dan Indonesia juga menyelenggarakan pesta demokrasi dengan tujuan untuk memilih anggota Legislatif dan juga anggota Eksekutif yang dimana ini bertujuan untuk menghindari praktik Money Politik dan reduksi dari para elit partai dalam pemilihan. Pemilu ialah wujud yang nyata demokrasi prosedural, namun demokrasi ini tidak sama dengan pemilihan umum, dan pemilihan umum juga merupakan suatu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh sebab itu, negara-negara yang dapat menanamkan diri sebagai suatu negara yang demokrasi dan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik yang dimana dibidang Legislatif dan Eksektuf baik dipusat maupun didaerah.

Persyaratan negara yang demokrasi ialah dengan adanya pemilihan umum yang dapat dilakukan secara regular yang dimana ini guna untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, dan bukan hanya demokratis dalm pemebentukannya tetapi ini bentuk dari menjalankannya tugas-tugasnya, oleh sebab itu pemilihan umum menjadi suatu hal yang sangat rutin bagi sebua negara yang bisa mengklaim sebagai sebuah negara yang demokrasi.

Robert A Dahl berpendapat, bahwasannya dalam sistem poltik yang demokrasi, kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat (dewasa), termasuk pula hak warga negara, ada akes untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah ataupun kelompok tertentu, namun pada akhirnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung kedalam kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah. Dengan demikian didalam sistem politik demokratis, posisi masyarakat ini

menjadi sangat vital. Oleh sebab itu pelaksanaan sistem politik yang demokratis harus dapat memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk:

1. Merumuskan kepentingannya sendiri.
2. Memberitahukan kepentingannya kepada sesama warga negara dan pemerintahan melalui tindakan individual dan kolektif.
3. Mengusahakan agar kepentingannya itu dapat dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintahan, dan tidak didiskriminasi berdasarkan asal usulnya.

Kemudian pelaksanaan sistem politik yang demokratis seharusnya tidak hanya sekedarnya menjalankan persyaratan pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan kaidah – kaidah demokrasi. Dan dengan berlangsungnya pemilu maka akan dapat mencerminkan kesadaran masyarakatnya yang demokrasi. Dengan demikian kadar demokrasi dalam pemilu dapat digunakan untuk memilih kadar demokrasi sebuah masyarakat bernegara. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak hanya menuntut demokrasi sebagai sebuah prosedur tetapi juga harus lebih dipentingkan dalam membutuhkan masyarakat demokrasi sebagai sebuah nilai yang lebih esensial. Yang dimana ada etika dalam berdemokrasi yang tidak boleh diabaikan didalam demokrasi yaitu nilai:

1. Kejujuran.
2. Keadilan
3. Kompetisi yang sehat dan partisipasi yang terbuka.

B. Perilaku Pemilih Masa Kini

Perilaku memilih adalah perilaku seseorang setelah memutuskan pilihan mana yang menurutnya paling populer atau paling tepat. Ada beberapa daerah/wilayah yang merupakan kumpulan masyarakat yang terbentuk atas dasar sistem kekerabatan dan perhimpunan berdasarkan garis keturunan, dan yang menjadi pemimpin masyarakat berasal dari keluarga keturunan atau kerabat adat dari orang-orang yang dianggap sebagai signifikan secara sosial. Dari segi keuangan atau karena kepribadiannya yang menonjol, anggota masyarakat seringkali mempercayai diri mereka sendiri dan sikap mereka terhadap para pemimpin/tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan dominasi tokoh yang berperan menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga negara kepada para pemimpin. Perubahan sikap serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya yang berbeda terbatas pada adanya sistem pemikiran atau gagasan dari pihak pemimpin masyarakat yang mengubah sistem tersebut dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor inilah yang menjadi kendala bagi caleg atau caleg untuk masuk ke komunitas-komunitas tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Apabila seorang caleg berhasil masuk ke dalam masyarakat, hal itu hanya dibatasi oleh etika sosial masyarakat yaitu penerimaan terhadap setiap orang asing yang tetap berhubungan tetapi tidak menuruti keinginan caleg/caleg.

Masyarakat yang heterogen tentunya cenderung lebih rasional, pragmatis, sulit dipengaruhi, terkadang ambivalen dan berorientasi material. Sehingga sikap dan pendapat untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politik ditentukan oleh sikap dan pendapat individu yang bersangkutan. Tidak mudah untuk memengaruhi orang tertentu atau koneksi asli. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Karena setiap masyarakat memberikan hak suaranya terhadap pemilu tentunya menjadi sebuah partisipasi seorang masyarakat. Partisipasi politik merupakan aspek penting dari negara demokratis dan fitur modernisasi politik. Di negara-negara yang proses demokrasinya secara umum baik, partisipasi warga negara cenderung meningkat. Modernisasi politik dapat mengacu pada aspek politik dan administrasi. Menurut Jack C. Plano Perilaku dapat dipahami sebagai pikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Dalam hal ini yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobi, kaukus dan kampanye). Jadi perilaku tidak hanya diartikan sebagai pemikiran ataupun tanggapan yang bersifat abstrak, tapi juga sebagai tindakan-tindakan dari pelaku politik tertentu. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis ini, menurut Martin Harrop dan William Miller, adalah contagion theory atau teori penularan. Menurut teori ini, pilihan politik seseorang dan partisipanship (semangat berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama yang akhirnya menjadi pilihan bersama.

Ada berbagai pendekatan untuk melihat perilaku pemilih. Menurut Dennis Kavanagh dalam bukunya *Political Science and Political Behaviour* menyebutkan bahwa ada tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis, psikologi sosial dan pilihan rasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis dan mendeskripsikan kecenderungan perilaku pemilih. Ketiga pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yang mengkaji hubungan antara kecenderungan sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Kecenderungan sosial ekonomi pemilih dan keluarganya terkait dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi politik keluarga, preferensi politik ayah atau ibu memengaruhi preferensi politik anak. Kecenderungan sosial ekonomi dapat berupa agama, lokasi, kelas sosial, demografi, dan banyak lagi. Namun, perilaku tersebut tidak lepas dari hal-hal yang lebih banyak diterima anak dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat anak. Selain itu, waktu lebih banyak dihabiskan di lingkungan keluarga daripada di lingkungan sekolah dan dengan teman sebaya. Hal ini memudahkan akses terhadap pesan yang diterima di lingkungan keluarga. Pilihan pemilih tentunya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat tinggalnya, yaitu lingkungan keluarga. Jenis perilaku ini terjadi karena mereka tidak melihat bagaimana kualitas seorang pemimpin sejati muncul. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat, sehingga keputusan politik mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka dan kelompok sosial yang membentuk tempat tinggal mereka, terutama di lingkungan keluarga dan orang tua mereka.

2. Pendekatan Psikologis

Dalam pendekatan psikologis, ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: Identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu. Pertama, identifikasi partai mengukur berbagai faktor predisposisi pribadi dan politik, seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik, yang relevan dengan individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik seringkali diwarisi dari orang tua dan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. pernikahan dan situasi darurat. Namun, karakter kandidat yang dianggap karismatik dan ideal bagi masyarakat dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap psikologi pemilih pemula, karena pemilih pemula cenderung mengambil keputusan berdasarkan konteks karakter tersebut. peran dominan. Dalam pendekatan psikologis, adanya pemilih yang mengidolakan seorang calon merupakan hasil penilaian mereka terhadap calon tersebut. Penilaian calon sangat dipengaruhi oleh masa lalu dan pengalaman mereka sebelumnya dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat, yang merupakan salah satu kriteria yang umumnya digunakan pemilih saat mengevaluasi seorang calon khususnya bagi PNS yang akan dipilih kembali, termasuk kualitas, kompetensi dan integritas calon. Pendekatan sosiologis dalam praktiknya terkait dengan pendekatan seseorang memilih calon dapat didasarkan pada kesamaan suku dan agama. Namun, hal ini dimediasi oleh persepsi dan sikap baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Dalam hal ini, faktor sosiologis objektif tidak muncul, tetapi faktor sosiologis sebagaimana yang dirasakan. Pentingnya faktor sosiologis terkait dengan faktor psikologis.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional, juga dikenal sebagai pendekatan ekonomi, dikembangkan pada tahun 1960 setelah konsensus tercapai bahwa pandangan yang berbeda-beda. Dalam hal secara independen, ada dua informan yang memilih alasan rasional untuk memilih seorang kandidat dan kemudian membandingkannya dengan kandidat lainnya. Sampai saat itu mereka mengumpulkan semua informasi yang bisa mereka dapatkan tentang pelamar. Dalam hal ini pemilih pemula tidak diuntungkan dengan mengalahkan kandidat yang sudah mapan, meski jumlahnya tidak banyak. Beberapa dari mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan, visi dan misi calon tertentu. Jadi ada semacam proses sosial ekologis. Pemilih juga tidak melihat uang atau barang sebagai acuan dalam pemilu.

C. Perspektif Mahasiswa terkait Money Politik

Dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik apabila demokratisasi yang dilaksanakan warga negara Indonesia menyalurkan hak suaranya dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun masih banyak masyarakat yang tidak sadat akan hak dan kewajiban mereka menjadi masyarakat yang tinggal didalam negara tersebut. Setiap pesta demokrasi banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suara mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu, sehingga yang dinamakan Golput (golongan putih) tersebut semakin meningkat. Masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan mereka dibanding dengan memberikan hak suara mereka terhadap partai tersebut, mereka memilih golput dikarenakan para calon partai politik tersebut tidak membawa perubahan apapun di dalam kehidupan mereka, begitu pula dalam money politik yang tidak dapat terlepas dalam kegiatan pemilu, banyaknya kandidat-kandidat partai politik tersebut melakukan hal yang diluar nalar, memberikan uang atau bantuan sembako guna untuk menarik simpati masyarakat, masyarakat begitu dengan muda menerima hal tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi tersebut.

Banyak pandangan yang di jelaskan narasumber, seperti tanggngatakan bahwasannya money Politik bukanlah hal mengejutkan lagi, sudah hal biasa terjadi pada saat menuju pemilu, para partai melakukan berbagai hal Untuk mendapatkan suara dari rakyat, Money politik ini sudah diturun kan dari Generasi ke generasi, banyaknya para partai melakukan Money politik yang dapat menarik simpati rakyat, sehingga rakyat goyah terhadap pilihannya tidak lagi melihat sudut pandang terhadap partai tersebut.

Terkait dengan golput juga sering terjadi pada saat pemilu yang disebabkan beberapa faktor antara lain, masyarakat trauma Terhadap partai yang tidak membawa perubahan terhadap masyarakat, masyarakat memilih pekerjaannya dibandingkan untuk menggunakan hak suaranya, golput ini sebenarnya tidak dapat dilakukan, Karena itu merupakan suatu hak kita sebagai warga negara yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Dalam menghadapi money politik dimana kita harus kembali pada diri sendiri, kita harus bisa mengatasi hal tersebut kita sudah kuat untuk melakukan perubahan tersebut baru kita realisasikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan demokrasi yang sehat tanpa adanya money politik.

Masyarakat harus dapat memilih partainya dengan melihat potensi yang ada pada partai, bukan melihat dari apa yang diberikan partai tersebut dalam menarik hak kita dalam memiliki kebebasan berpendapat. Hal tersebut dapat kita realisasikan dengan persoalan kultural. Harus ada keberanian mahasiswa untuk Menolak politik uang. Meminta kepada keluarga untuk tidak menerima uang Dari kandidat dalam pesta demokrasi. Baginya, apabila ada orang tua yang Menerima uang, maka menjadi tugas kita sebagai mahasiswa untuk ingatkan supaya tidak menerima. Jika dilakukan secara serius dan masif, maka akan berimbas kepada kehidupan demokrasi Indonesia yang bebas politik uang dalam beberapa waktu ke depan. Kita juga bisa turut berpartisipasi dalam menekan kampanye hitam dan informasi hoaks. mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya tidak mudah menulis atau menyebarkan berita hoaks yang akan menjerumuskan publik dengan informasi yang tidak benar.

Dari penjelasan diatas alasan mengapa orang tidak menggunakan hak Pilihnya dapat dengan mudah dibagi menjadi dua kelompok besar: faktor Internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal sebagai alasan pemilih Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan alasan eksternal sebagai Alasan yang muncul dari luar pemilih itu sendiri.

- 1) Faktor Internal: faktor dari dalam individu.
 - a. Faktor teknis adanya kendala yang bersifat teknis yang Dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk Menggunakan hak pilih. Contoh saat hari pencoblosan Pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain Serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut Pribadi pemilih.
 - b. Faktor Pekerjaan Faktor pekerjaan adalah pekerjaan Sehari-hari pemilih.
- 2) Faktor Eksternal : faktor dari luar.
 - a. Faktor Administratif Faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang Mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Contoh Tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan Tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).
 - b. Faktor Sosialisasi Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir Golput.
 - c. Faktor Politik Adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek Politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tidak punya pilihan terhadap calon, tidak percaya pilkada/pemilu membawa perubahan.

Komitmen dalam mencegah money politik ataupun golput tentunya harus ditanamkan dalam pikiran dan hati nurani yang di sodorkan sejumlah uang demi memilih nama tertentu supaya menolak secara langsung, karena prinsip luberjurdil memilih suatu pemimpin apa yang sudah tercapai, bukan yang diberi berdasarkan uang. Karena dari apa yang dilihat, bahwa jika seorang pemimpin melakukan money politik berarti dia tidak percaya apa yang sudah dicapai untuk menjadi seorang pemimpin.

D. Pentingnya Pemahaman Politik

Pemberian pemahaman politik kepada masyarakat tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan, beberapa faktor yang dapat memengaruhi masyarakat dalam pemahaman politik yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor gender. Jika faktor ini dapat berperan aktif maka tentunya dapat mempengaruhi masyarakat terhadap arah politiknya. Budaya merupakan salah satu faktor yang juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik. Menurut Moctar mas'ood dan Colin Mac Andrew (1996:41) mengatakan budaya politik merupakan sikap dan orientasi warga negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Pemilih pemula yang diharapkan nantinya lebih cerdas, cermat dalam memilih karena ini merupakan menjadi aspek penting pada setiap warga negara. Sebagai pemilih cerdas dan cermat hal terpenting yang dilakukan adalah rajin mencari informasi, rekam jejak calon, mulai dari latar belakangnya, pendidikannya, sampai dengan trek record kerjanya dan melihat apakah sudah sesuai dengan visi misi yang pernah dijanjikan. Hal ini menjadi penting agar bisa menjadi pemilih cerdas dan cermat dan salah satu cara yang dapat dilakukan agar menjadi pemilih cerdas dan cermat. Adapun tujuan dari pemahaman politik pada pemilih antara lain:

1. Membangun kesadaran dan pemikiran kritis para pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan pemilu yang bersih dan anti politik uang lewat pendidikan politik.

2. Memberi informasi terkait prosedur memilih (bagaimana cara memilih, bagaimana memastikan diri terdaftar di DPT, bagaimana cara mengecek rekam jejak caleg, dll).
3. Menjadi lebih melek politik. Pemilih yang melek politik adalah pemilih yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan.

KESIMPULAN

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi partisipasi masyarakat, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam lembaga baik itu ditingkat daerah maupun ditingkat nasional. Adapun partai politik yang dimana salah satu ciri khas demokrasi sebuah negara dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Dalam era demokratisasi sekarang ini, hubungan antara kandidat dengan pemilih adalah hubungan yang tidak stabil. Sehingga timbulnya money politik. Money Politik merupakan pengaruh yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang tentunya dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Hal tersebut disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan berbagai macam transaksi. Money Politik tentunya bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena sejak awal mula pemilihan secara langsung dilaksanakan, praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama dalam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat mengakhiri tulisan ini dengan judul “Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik dan Golput”. Penyusunan artikel ini tidak lepas dari bantuan pihak lain, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu menyemangati penulis dan Bapak Prayetno yang selalu membimbing penulis selama proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, 11(2), 615–624. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>
- Arianto, B. (2019). Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 1. <https://www.kab-madiun.kpu.go.id/category/ppid/daftar-pemilih>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.20-31>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milenial dalam Pemilu. *Jurnal Arista*, 7(2), 228. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608>
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. In *Pt Rajagrafindo Persada* (Vol. 1).
- Nanik Prasetyoningsih. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241–263. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1190/1251>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Pratama, R. A., & Wahyudi, D. (2021). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *Journal of Criminal Law*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>

- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2013). Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang. *Jurnal Reformasi*, 3(2), 90–95.
- Subanda, N. (2019). Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 60–72.
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) AK. *Media Neliti*, 16.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Yanuarti, S. (2019). *Golput dan Pemilu di Indonesia*. 48(3).
- Zhou, Yang, & Wang. (2020). Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 21(1), 1–9.